

Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa

Nurudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia
Naskah diterima redaksi, 7 Agustus 2013

Abstract

This paper is the result of a survey in private religious university in 10 provinces in Indonesia which potentially has religious radicalism among students. The conceptual model used in this study is the construction of radicalism measured by several indicators: things that are based on the theological, the models and strategies of political radicalism. The pattern of religious radicalism among students measured in four levels which are still settles. Firstly, radicalism latent in students' theological consciousness in the religious life. Secondly, have entered the realm of strategic awareness for the actualization of religious messages. Third, the tendency to act more conditional, rational and pragmatic. Fourth, radicalism that leads to religious behavioral that manifested in violence, terror, suicide bombings, and attacks on groups considered at odds with their religious understanding. The potential of therapy radicalism among students is the basis of the values of peace in socio-religious-conflict resolution due to the religious radicalism among students.

Keywords: Radicalism, religion, student, peace.

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil survei terhadap mahasiswa PTA di 10 provinsi tentang potensi radikalisme agama di kalangan mahasiswa. Model konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah konstruksi radikalisme yang terukur berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari radikal dalam hal-hal yang berbasis pada pendirian teologis, sampai pada model dan strategi politik radikalisme. Corak radikalisme agama di kalangan mahasiswa diukur dalam empat level, *Pertama* radikalisme yang masih mengendap laten dalam kesadaran teologis mahasiswa dalam kehidupan keagamaan. *Kedua* telah memasuki ranah kesadaran strategis untuk aktualisasi pesan-pesan agama. *Ketiga*, ranah kecenderungan bertindak yang lebih bersifat kondisional, rasional dan pragmatis. *Keempat* radikalisme yang mengarah pada perilaku keagamaan dengan manifestasi kekerasan, teror, bom bunuh diri, dan penyerangan terhadap kelompok yang dinilai berseberangan dengan paham keagamaan mereka. Terapi potensi radikalisme di kalangan mahasiswa ini adalah basis nilai-nilai perdamaian dalam rangka penyelesaian konflik sosial-keagamaan akibat potensi radikalisme agama di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: Radikalisme, Agama, Mahasiswa, Perdamaian.

Pendahuluan

Wajah ramah dan toleran terhadap fenomena keragaman di Indonesia mulai tercoreng oleh maraknya faham radikalisme agama. Kasus bom bunuh diri (*suicide bombings*), penyerangan terhadap para penganut paham keagamaan minoritas yang diiringi pengrusakan asset publik, telah menjadi catatan merah, untuk raport toleransi beragama di tanah air.

Secara genealogis, Marty menggarisbawahi munculnya radikalisme agama berawal dari pemahaman agama yang cenderung skriptural-tekstualis, sempit, dan hitam-putih. Pemahaman semacam ini dengan mudah akan menggiring pada keyakinan yang cenderung fundamentalis, bahkan sikap keagamaan yang kaku. Sedangkan fundamentalisme sendiri adalah spirit gerakan radikalisme agama yang mendorong penggunaan cara-cara kekerasan dalam memenuhi kepentingan dan tujuan mereka. Sehingga pada saat kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang tidak menentu, tidak sedikit orang yang mengambil 'jalan pintas kekerasan' dengan mengatasnamakan agama (Martin E. Marty, 1995: 27).

Radikalisme agama dapat pula bersumber dari pembacaan yang salah terhadap sejarah agama yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap doktrin agama pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan ortodoksi yang selalu eksis di hampir semua agama. Tema pokok dari sel ortodoksi ini adalah pemurnian agama—membersihkan agama dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai 'sesuatu yang menyimpang'. Namun upaya pemurnian tersebut justru acapkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Dengan pemahaman dan praksis keagamaan seperti itu, kelompok dan sel radikal ini 'menyempal' (*splinter*)

dari *mainstream* agama yang memegang 'otoritas' teologis (Ibid).

Radikalisme agama juga masuk melalui deprivasi politik, sosial dan ekonomi. Pada saat bersamaan, disorientasi dan dislokasi sosial budaya, akses globalisasi, dan semacamnya menjadi tambahan faktor penting bagi kemunculan kelompok 'fundamentalis-radikalis'. Kelompok ini tidak jarang mengambil bentuk kultus (*cult*), yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; sehingga waktunya bertobat melalui pemimpin dan kelompok mereka.

Gerakan fundamentalis-radikalis dari kaum agama senyatanya selalu menjadi teror yang menakutkan dan ancaman ketertiban, mengingat fakta siapa musuh sasaran dalam konstelasi target operasi kekerasan, sulit untuk dipetakan dan dilokalisasi dalam spektrum perlawanan. Walaupun *khittah* awal perjuangan mereka adalah perlawanan terhadap simbol dan kepentingan Barat yang sekuler dan hedonis, pada saat melakukan bom bunuh diri, mereka justru mengorbankan umat beragama yang tidak berdosa, bahkan kelompok korban yang seiman dengan pelaku teror. Ekspresi gerakan radikal seperti ini jelas tidak boleh dibiarkan, seperti duri dalam daging, karena ia telah, dan akan terus menohok dan menghantui perasaan masyarakat dalam dekapan rasa ketakutan dan kecemasan.

Semua agama sejatinya tidak pernah mengajarkan kekerasan. Kekerasan dilarang oleh setiap agama, sekeras kekerasan itu sendiri. Tetapi serumpun umat beragama dengan militansi untuk menegakkan misi agamanya, sering mengabaikan toleransi, kearifan, kelembutan serta keramahan

agama. Sebaliknya, retorika dan saluran instrumental yang dikedepankan adalah watak pemaksaan, kekerasan, dan anti kompromi. Parahnya, paham radikalisme ini telah merambah dunia pendidikan.

Fenomena radikalisme beragama juga telah memasuki ranah kampus perguruan tinggi. Beragam penelitian dan pengakuan mereka yang keluar dari sel-sel jaringan gerakan keagamaan radikal mengisyaratkan bahwa mahasiswa perguruan tinggi agama (PTA) dan umum (PTU) rentan terhadap rekrutmen anggota gerakan radikal (Azyumardi Azra, 2011); (Lihat juga Azyumardi Azra, 1996). Walaupun tidak dalam format yang ekstrim, fenomena militansi, tepatnya semangat revivalisme agama sudah mulai marak di kampus di awal 1980-an. Di tahun 1980, sukses revolusi Islam Iran, dengan tokoh kharismatik Ayatullah Khomeini, telah melahirkan harapan baru bagi dunia Islam politik (<http://www.ssrc.org/sept11/essays/metcalfe.htm>, diakses 3 Mei 2012).

Fenomena kesuksesan Khomeini menumbangkan rejim dinasti Pahlevi, melahirkan gerakan kajian Islam intensif tentang ideologi Islam politik di sejumlah kampus besar, dan terkenal di tanah air. Semarak kajian yang bernuansa Islam eksklusif dan fundamentalis ini nampak meriah dalam kajian Islam kelompok mahasiswa di kampus-kampus besar seperti ITB dan UGM. Fenomena *halaqah* ala Islam *usroh* juga mulai merambah kampus. Geliat dan gairah gerakan Islam politik kampus dalam wujud aksi Lembaga Dakwah dan organisasi kemahasiswaan yang terus menguat. Bahkan ia telah menjadi kekuatan baru yang setiap saat siap menyuarakan paham Islam yang cenderung ekstrim baik di ranah sosial maupun politik.

Belakangan fenomena radikalisme agama menjadi semakin terkuak di ranah kampus saat seorang alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

terlibat dalam jaringan teoris Nurdin M. Top. Di daerah lain, kampus menjadi lahan subur untuk menyemai benih, dan merekrut simpatisan pegiat radikalisme dan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Kampus telah menjadi target khusus untuk operasi rekrutmen simpatisan gerakan ini. Banyak mahasiswa, tiba-tiba, menghilang dengan membawa sejumlah aset keluarga, untuk kemudian terjebak dalam lingkaran aksi paham keagamaan radikal dan eksklusif. Ringkasnya, kampus dan civitas akademika, terutama mahasiswa, baik kampus perguruan tinggi yang berlabel agama, atau kampus-kampus umum, sungguh tidak steril, dan kebal dari jangkauan paham keagamaan fundamentalis dan radikal. Menurut Azra (2011), berdasarkan pengakuan mereka yang keluar dari sel-sel radikal dan ekstrim mengisyaratkan bahwa mahasiswa PTU lebih rentan terhadap rekrutmen untuk menjadi anggota gerakan radikal daripada mahasiswa PTAI. Gejala ini berkaitan dengan kenyataan bahwa cara pandang mahasiswa PTU khususnya bidang sains dan teknologi, cenderung melihat masalah agama secara hitam putih. Sebaliknya, mahasiswa PTAI yang mendapat keragaman perspektif tentang Islam cenderung lebih terbuka dan bernuansa kontekstual (Azyumardi Azra, 2011).

Di Indonesia, banyak perguruan tinggi yang secara khusus, detail, dan mendalam mengajarkan agama dan ilmu agama. Secara pragmatis, pendidikan dan pengajaran agama model ini bertujuan rangkap untuk mendidik calon sarjana agama yang intelektual, berawasan pemahaman agama yang holistik, dan sekaligus diharapkan menjadi tokoh-pemuka agama yang mumpuni dan berkualitas untuk menjadi figur teladan dalam kehidupan beragama. Fenomena ini tidak hanya muncul di kalangan umat Islam, tetapi juga semarak di komunitas beragama lainnya. Kebijakan pemerintah, setiap agama memiliki perguruan tinggi

agama negeri yang secara khusus mendidik calon sarjana masing-masing agama. Di sini kehadiran PTA, dalam perkembangan selanjutnya, telah menjadi gerbang *misionaris* (dakwah) untuk menyemai nilai-nilai keagamaan dan wadah pendidikan serta pemusatan pembinaan persiapan para tokoh agama yang dibutuhkan di setiap komunitas agama. PTA sebagai lembaga pendidikan tinggi, dalam konteks ini, memainkan peranan strategis dan krusial dalam *menggodok* calon lulusan yang siap melayani hajat publik umat beragama. Dalam konteks peranan PTA, semarak aksi radikalisme berwajah agama juga potensial terjadi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi termasuk PTA, pada gilirannya akan merasuki kesadaran masyarakat.

Data Radikalisme Agama di Ruang Pendidikan

Sejumlah penelitian mencatat bahwa ledakan radikalisme hanya tinggal menunggu waktu, konteks dan momentum yang tepat untuk menjelma dalam bentuk gerakan teror. Hasil survei Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta, menunjukkan bahwa sebagian besar (77 %) responden muslim di Jakarta ternyata mengidealisasikan hukum syariah sebagai hukum positif bagi umat Islam (Laporan Penelitian, *Ancaman bagi Ideologi Negara melalui Radikalisme Agama*, 2011).¹ Bahkan, 76 persen responden merindukan kehadiran negara Islam yang menerapkan hukum Islam. Gejala ini bisa saja berujung pada aksi radikal sebagai manifestasi kesadaran dan harapan ideologis di ranah politik.

Di pertengahan tahun 2011, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menemukan fakta yang tidak jauh berbeda dengan temuan survei Lemlit Uhamka. Survei LSI 2011 dengan sampel nasional yang representatif (dengan

kesalahan pencuplikan ≤ 3 persen) menemukan fakta bahwa lebih dari separo (56 %) responden remaja muslim (pelajar SMU) setuju dengan gagasan penerapan hukuman *qishosh* mati bagi pembunuh; 69 persen setuju hukuman cambuk diterapkan untuk pemabuk, dan 49 persen menyatakan setuju terhadap gagasan penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri. Perlu ditambahkan bahwa hasil penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), tahun 2011 lebih jauh menemukan fenomena lain dari radikalisasi cara beragama. Penelitian ini melibatkan 590 responden dari total 2.639 guru pendidikan agama Islam (PAI) di SMA dan 993 siswa Muslim dari total 611.678 murid SMU se-Jabodetabek. Sampel diseleksi secara random. Terkait dengan kasus toleransi, penelitian ini menemukan fakta bahwa 63 persen responden guru PAI, dan 49 persen siswanya keberatan jika rumah ibadah umat beragama lain didirikan di wilayah tempat tinggal mereka.

Ada fakta lain yang menarik untuk dikritisi kaitan dengan fenomena ini. Secara statistik, memang cukup rendah dukungan publik terhadap eksistensi organisasi keagamaan radikal. Namun, hasil penelitian Setara Institute, 2010, dengan 1.200 sampel muslim berusia ≥ 17 tahun yang diseleksi secara random di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, layak untuk direnungkan (Ismail Hasani, et.al, 2011). Di sini, 8,5 persen responden menyatakan persetujuan pada gerakan keagamaan radikal, bahkan mereka siap memberi dukungan finansial dan siap bergabung dengan gerakan keagamaan radikal. Sementara itu, 60,9 persen responden tidak dapat menerima kehadiran paham keagamaan baru di luar mazhab dan aliran mainstream, serta setuju jika paham keagamaan baru ini tidak diberi ruang untuk berkembang.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Agama RI, secara khusus telah melakukan berbagai penelitian yang menyoroti fenomena radikalisme agama di domain pendidikan. Secara berkala, terdapat setidaknya tiga penelitian yang telah dilakukan terkait fenomena radikalisme agama tersebut.

Pertama, penelitian tentang *Kerohanian Islam (ROHIS) dan Kehidupan Agama di SMU*. Penelitian yang dilakukan selama kurun 2009 ini dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain: DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang, Bandung, Medan, Palangkaraya, Manado, dan Kupang. Penelitian dengan metode kualitatif-deskriptif ini menunjukkan hasil, antara lain: (1) Dari aspek aktivitas, terdapat beragam kegiatan ROHIS yang menunjukkan kemiripan dengan pola ideologisasi gerakan fundamentalisme, seperti *mentoring* yang merupakan pengajian nilai keagamaan melalui para mentor sebagai metode efektif melakukan pendalaman gerakan dakwah dan ideologisasi, *liqo'* sebagai pertemuan rutin para anggota ROHIS secara berkala, identik dengan program *usrah*, yang menjadi ciri khas aktivis dakwah kampus. Terdapat pula aktifitas yang disebut *mabit*, *daurah*, *rihlah* hingga seminar dengan membedah pemikiran para tokoh gerakan Islam *Ikhwanul Muslimin* Hassan al Banna, Sayid Quthb dan lain-lain; (2) Secara jaringan ROHIS terafiliasi secara kultural-ideologis dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang berbasis ideologi Islam 'kanan', dan juga terindikasi berafiliasi dengan salah satu partai politik tertentu yang berbasis Islam; (3) Dalam sikap sosial-keagamaan, pola kehidupan yang cenderung diidealkan oleh para anggota ROHIS adalah pola kehidupan dinamis (gaul *syar'i*) yang dalam batas tertentu memberikan kesempatan khusus bagi berkembangnya sikap toleransi antar umat manusia. Meski terbuka

dalam bergaul dengan pihak manapun, termasuk dengan pihak non-muslim, namun harus dalam kerangka pergaulan yang islami, tanpa memisahkan antara kehidupan *duniawi* dan *ukhrawi*. (4) Secara historis, dalam konteks gerakan, semenjak kurun 80-an menuju masa reformasi, ROHIS menunjukkan perkembangan ideologis Islam fundamentalis dengan banyak mengusung simbol-simbol Islam. Sehingga dalam konteks kenegaraan, meski tetap mengakomodasi kemajemukan, namun idealnya kaidah-kaidah pemerintah termasuk sumber aturan dan kebijakannya harus menggunakan dasar-dasar agama yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagaimana verbalisasi hukum Islam sebagai dasar aturan bagi negara melalui perjuangan Piagam Jakarta.

Kedua, penelitian tentang *Pola Aktifitas Kelompok Keagamaan di Kalangan Mahasiswa Pasca Reformasi*. Penelitian pada 2005 ini dilakukan atas kerjasama Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan LabSosio Universitas Indonesia dan mengambil studi kasus di enam Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN) yaitu: Universitas Indonesia (Jakarta), Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sebelas Maret (Solo), Universitas Brawijaya (Malang) dan Universitas Airlangga (Surabaya). Dengan metode observasi dan wawancara mendalam, didapatkan realitas unik dari kehidupan sosial-keagamaan kampus di keenam PTUN tersebut, yakni (1) dari sisi metode gerakan, terdapat aktifitas keagamaan di enam PTUN ditemukan corak metode (*thoriqoh*) penerapan ideologi *Khilafah Islamiyah*, metode menjaga ideologi berbasis hukum Islam, dan metode penyebarluasan ideologi berupa dakwah dan jihad; (2) di kalangan mahasiswa terdapat sejumlah grup aktivis keagamaan yang menjadi *icon* penggerak dan pentolan panutan dalam

kegiatan keagamaan; (3) gerakan mereka dikelola dalam bentuk kajian dan aktivitas sosial-keagamaan bersistem halaqah dan mentoring; (4) sumber rujukan dari buku-buku terjemahan karangan ulama timur Tengah yang mengedepankan doktrin Islam bernuansa fundamentalis; (5) ditopang dengan sistem kaderisasi kreatif yang berbasis mentor (*murabbi*) yang terpercaya dengan konsistensi dan kontinuitas sistem kaderisasi, bekerja dalam sistem jaringan yang terkelola dengan baik, serta menjaga rapih simbol tradisional yang diusung, seperti atribut jilbab panjang dan jenggot.

Ketiga, penelitian *Potensi Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama* yang dilakukan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Tahun 2012, menunjukkan hasil yang berbeda dengan kesimpulan *mainstream* dan teori besar (*grand theory*) radikalisme yang ada selama ini. Jika teori besar selama ini menyatakan bahwa potensi radikalisme kerap kali dimotivasi dan dilatari oleh konteks sosio-politik gerakan anti Barat, maka penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendalaman kualitatif ini justru menunjukkan kecenderungan berbeda, yakni (1) bahwa potensi radikalisme di kalangan mahasiswa justru timbul karena faktor internalisasi pemahaman keagamaan yang cenderung ideologis dan tertutup dan tidak semata-mata beriringan dengan gerakan radikalisme yang bermotif politik anti Barat; (2) bahwa potensi radikalisme yang berbasis pada pemahaman ideologis yang cenderung kaku dan hitam-putih tersebut terjadi di semua agama, baik di lingkungan mahasiswa muslim, Katolik, Kristen, Hindu maupun Budha. Hasil penelitian ini dielaborasi dalam tulisan ini dan terapi radikalisme agama dikalangan mahasiswa melalui nilai-nilai perdamaian.

Potensi Radikalisme di Semua Agama

Temuan sejumlah hasil penelitian di atas sungguh mengindikasikan eksistensi gejala sikap dan kecenderungan keagamaan radikal yang tidak toleran di sejumlah wilayah di tanah air. Namun sejatinya, kemunculan fenomena gerakan keagamaan radikal tidak identik dengan label Islam. Sejarah Barat Kristen juga telah mencatat gerakan radikal fundamentalis Katolik di Irlandia Utara, Yahudi sayap kanan di Israel, dan sejumlah kelompok minoritas radikal Hindu di India, sekte Tamil di Srilanka, serta bom dan pembantaian terhadap sekelompok remaja yang sedang *camping* di satu pulau kecil di Norwegia, 2011 lalu. Di tubuh agama leluhur Jepang, juga dikenal satu gerakan radikal sekte kebatinan (Syamsul Bakri, 2004: 5). Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian mutakhir terhadap potensi radikalisme di kalangan mahasiswa PTA di Indonesia.

Di sini, potensi radikalisme di semua agama, pada gilirannya, akan mewujudkan nyata dalam usaha perjuangan kelompok radikal untuk menyebarkan visi-misi-pesan agama yang berpusat pada rumah ibadah, media cetak dan elektronik, dan kontestasi frontal serta adu strategis memperebutkan ranah kekuasaan negara secara formal. Semangat militansi yang dipupuk terus-menerus dalam ideologi 'perang suci' (*holly war*) sangat berpotensi pada ekspresi radikalisme. Pada gilirannya, ekspresi radikalisme mengakibatkan aksi kekerasan atas nama agama. Konsep teologi dan doktrin agama yang fundamental, sering dijadikan dasar pembenaran terhadap aksi radikal atas nama agama tersebut.

Permasalahan, Konsepsi Teoritik, dan Metode Penelitian

Tulisan ini secara umum berupaya menghadirkan hasil penelitian tentang potensi radikalisme dikalangan

mahasiswa perguruan tinggi agama yang secara garis besar, rumusan masalahnya adalah “*Bagaimana pemahaman keagamaan dan potensi sikap dan kecenderungan radikalisme agama di kalangan mahasiswa PTA?*” Masalah utama penelitian ini dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: a). Bagaimana pemahaman dan potensi sikap-kecenderungan keagamaan radikal di kalangan mahasiswa PTA? b). Apakah pemahaman keagamaan berpengaruh secara signifikan terhadap potensi sikap-kecenderungan keagamaan radikal di kalangan mahasiswa PTA? c). Apa faktor-faktor sosial-ekonomi-politik-budaya-psikologi keagamaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap sikap-kecenderungan keagamaan radikal di kalangan mahasiswa PTA? dan d). Bagaimana wujud ekspresi radikalisme di kalangan mahasiswa PTA?

Penelitian ini menggunakan kombinasi teori-teori sosial dan keagamaan (teologis) untuk memahami dan menjelaskan fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa PTA. Survei ini berhipotesis bahwa model pemahaman keagamaan dan kondisi sosial-ekonomi-struktural mempengaruhi perwatakan (sikap), dan kecenderungan perilaku keagamaan warganya. Di sini, kesadaran keagamaan, pengalaman dan kondisi sosial-ekonomi-kultural-politik dan psikologis seseorang akan membentuk gayanya untuk memaknai fakta dalam berinteraksi dengan orang lain. Meskipun pengaruh yang muncul kemudian terlihat tidak bersifat deterministik, langsung dan satu-arah, namun di sana selalu saja terdapat relasi (lebih sering bercorak kompleks) yang cukup nyata antara kondisi lingkungan sosial-demografis-ekonomi suatu daerah dengan tingkah laku para penghuninya. Bertolak dari asumsi dasar di atas, penelitian ini meyakini bahwa keragaman paham keagamaan, kondisi sosial, ekonomi, kultural dan demografis asal daerah responden, dengan

segenap relasi sosial, kultural, ekonomi dan politiknya, berpengaruh terhadap sikap dan kecenderungan perilaku radikal keagamaan.

Radikalisme adalah satu wujud ekspresi dan artikulasi pesan keagamaan dengan cara kekerasan untuk merealisasikan daftar *mimpi* yang melangit dalam doktrin *puritanisme* dan *fundamentalisme*. Ada *intersepsi*, titik singgung yang sangat dekat antara *terorisme* dan *radikalisme*. Perbedaan antara keduanya sulit dibentangkan benang merah yang demarkatif, dan distingsi yang jelas. Keduanya adalah manifestasi prinsip-prinsip *fundamentalisme* dan *puritanisme*. Dalam kesulitan pembedaan ini, *radikalisme*, walaupun menggunakan kekerasan, frekuensi dan intensitasnya lebih moderat dibanding ekspresi aktual *terorisme*. *Kedua*, jika *terorisme* bergerak dalam format *rahasia*, *bawah tanah*, tidak *frontal*, *radikalisme*, sebaliknya, cenderung memilih model aksi, dan ekspresi perlawanan terbuka menentang segala hal yang diyakini secara kuat berseberangan dengan keyakinan pelakunya. *Dogmatisme* dan *otoritarianisme* agama, yaitu gerakan beraliran sayap kanan (*wright-wing-authoritarianism*) berada di hulu alir *radikalisme*.

Retorika *radikalisme* bergerak membentang mulai dari cara yang agak kompromis-negosiatif-rekonsiliatif, sampai pada format demonstrasi yang vulgar, bahkan dapat berujung pada anarkisme, seperti dalam wujud penyerangan (penghinaan, pemukulan bahkan pembunuhan) terhadap individu lawan politik, atau pengrusakan aset-aset kelompok yang dimusuhi. Dalam wujudnya yang non kekerasan fisik, *radikalisme* menjelma dalam wujud *hate speech*, *labelisasi* negatif, *stigmatisasi*, dan *condoning* (komentar, sikap dan kebijakan yang menjurus pada usaha yang dapat memicu aksi agitasi dan kekerasan). Dalam wujudnya yang paling sederhana,

radikalisme menjelma dalam kesadaran penentangan, penolakan, atau agitasi terhadap segala gagasan yang dinilai menyimpang. Ringkasnya, radikalisme, dalam tulisan ini, adalah sikap dan kecenderungan melakukan aksi kekerasan untuk menentang segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip agama yang diyakini penganutnya, atau sebagai ekspresi praksis, nyata untuk mewujudkan visi-misi agama yang dianut oleh para pelakunya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei, dan dilakukan di 10 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Seleksi provinsi dilakukan secara purposif, dan didasarkan atas pertimbangan sebaran PTA di setiap provinsi sasaran, terutama PTA negeri yang secara administratif berada di bawah payung pembinaan Kementerian Agama. Selain itu, unsur lokalitas sosial-kultural-ekonomi juga menjadi pertimbangan penting lainnya dalam pemilihan provinsi sasaran. Faktor-faktor demografis, sosial-ekonomi, politik, bahkan kultural, diteoritisasikan mempengaruhi sikap dan kecenderungan individu dalam bersikap dan berperilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Potret Karakteristik Keagamaan, Sosial, dan Budaya Mahasiswa PTA

Profil sikap teologis dan sosial keagamaan mahasiswa tergambarkan dalam variabel-variabel orientasi model paham keagamaan (absolutisme kebenaran agama, dan ketercukupan ajaran agama), keyakinan keagamaan, (teologis), dan sikap sosial keagamaan yang dipilih menjadi dimensi eksklusivisme yang terkait dengan masalah pendirian-prinsip keagamaan dan inklusivisme yang terkait dengan penyikapan mahasiswa terhadap

isu-isu sosial-keagamaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Untuk menjelaskan komposisi konstruktif dari masing-masing variabel dan sub variabel di atas, terlihat dalam uraian hasil penelitian yang dianalisis dengan indikator-indikator untuk setiap variabel dan subvariabel dimaksud.

Data tentang tingkat paham absolutisme kebenaran agama, direntang dari 1 untuk penerimaan relativisme kebenaran agama, sampai level 100 (absolutisme kebenaran agama). Secara umum, tingkat orientasi paham absolutisme mencapai 66 poin. Mahasiswa muslim yang menjadi responden memperlihatkan level paling tinggi (79) dari keyakinan terhadap paham absolutisme kebenaran agama. Responden Buddha memperlihatkan level yang paling rendah (20). Namun, dalam konteks ini, di kalangan responden Buddha terjadi polarisasi radikal yang diperlihatkan oleh data standar deviasi. Data standar deviasi ini mengisyaratkan bahwa di kalangan mahasiswa Buddha ada komunitas yang sangat meyakini absolutisme agama, sebaliknya, ada di antara mereka yang sangat terbuka terhadap relativisme kebenaran agama.

Sedangkan data tentang tingkat keimanan responden terhadap kuasa Tuhan. Secara keseluruhan, tingkat keimanan responden terhadap kekuasaan Tuhan cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 90. Responden Buddha memperlihatkan tingkat keimanan yang paling rendah, sedang responden yang berasal dari tradisi agama semitik (Islam-Kristiani) dan Hindu menunjukkan level keyakinan yang sangat tinggi.

Data tentang sikap keagamaan mahasiswa PTA terhadap beberapa isu teologis dan sosial-keagamaan memperlihatkan, tingkat eksklusivisme beragama responden relatif moderat,

hanya berkisar 37 dari *score* maksimal 100. Secara detail, responden muslim memperlihatkan sikap eksklusivisme yang paling tinggi (43) terhadap sejumlah isu-isu fundamental dalam beragama. Satu hal yang penting untuk digaris-bawahi bahwa *standar deviasi* untuk setiap agama relatif tinggi, yaitu di atas 50 persen dari *score* rata-rata. Data statistik ini mengisyaratkan bahwa ada variasi tingkat eksklusivisme yang cukup besar di kalangan responden. Artinya, ada banyak mahasiswa PTA yang cenderung bersikap eksklusif terhadap hal-hal fundamental agama, dan, sebaliknya, ada dari mereka yang cenderung bersikap sangat inklusif. Dengan kata lain, data dalam penelitian ini memperlihatkan tingkat variasi eksklusivisme yang cukup signifikan. Variasi ini sangat strategis dan relevan untuk menguji lebih jauh pengaruh faktor sikap eksklusivisme-inklusivisme beragama terhadap radikalisme mahasiswa PTA.

Pada sisi yang lain, tingkat inklusivisme beragama responden cukup tinggi, sekitar 75, seperti diperlihatkan pada Tabel 8. Satu Hal yang menarik bahwa responden muslim memiliki tingkat inklusivisme yang paling tinggi, di atas standar rata-rata lintas agama, dan standar deviasi untuk variabel sikap inklusivisme cukup kecil. Ini mengisyaratkan bahwa sikap inklusivisme relatif merata di kalangan mahasiswa PTA, terlepas apa agama yang dianut. Secara tentatif dapat disimpulkan bahwa sikap eksklusif dalam beragama menjadi watak sosial-keagamaan mahasiswa PTA. Namun demikian, benih-benih eksklusivisme ternyata masih terpendam rapih di alam bawah sadar sejumlah mahasiswa.

Banyak orang tidak sependapat bahwa isu agama adalah masalah privat, yang tabu untuk ditarik ke ranah publik, apalagi memasuki ranah politik.

Kelompok aktivis agama politik (agama politik), seperti gerakan Hizbut Tahrir atau kelompok 'fundamentalis' menghendaki positivisasi ajaran, tepatnya hukum agama dalam kancah kenegaraan. Bahkan semangat untuk mendirikan negara agama masih sering terdengar, seperti gerakan Negara Islam Indonesia. Usaha untuk mempositivisasikan hukum Islam, terutama pidana Islam gencar disuarakan oleh kelompok tersebut. Adapun semangat positivisasi dan aplikasi ajaran agama dalam kehidupan pribadi dan publik cukup tinggi. Mahasiswa muslim memperlihatkan semangat tertinggi untuk etos positivisasi hukum agama. Temuan ini tidak mengagetkan mengingat sejumlah penelitian terdahulu juga menemukan fenomena yang sama, yaitu keinginan dan dukungan sektarian terhadap usaha positivisasi hukum Islam.

Tingkat deprivasi responden pada ranah sosial relatif tidak terlalu tinggi, dan cenderung merata lintas agama. Responden Hindu melaporkan tingkat deprivasi sosial yang paling rendah. Namun demikian, tingkat standar deviasi deprivasi cukup tinggi, hampir mencapai 40 persen dari *score* rata-rata. Dalam konteks ini, tingkat deprivasi sosial di kalangan responden cukup bervariasi. Artinya bahwa ada kelompok responden yang sangat mengalami deprivasi sosial. Variasi deprivasi sosial ini nampaknya tidak dapat terpisahkan dari variasi konteks sosial kehidupan responden. Dengan latar belakang kehidupan sosial masyarakat periperal, kehadiran dan interaksi mereka di ranah metro bahkan megapolis, seperti di Jakarta, Bandung Surabaya, dan Denpasar dengan beban heterogenitas dan kompleksitas problem sosial menjadi faktor konstruktif penting terhadap variasi deprivasi sosial. Di sisi lain, tingkat deprivasi ekonomi juga relatif tergolong rendah di kalangan mahasiswa PTA. Responden muslim

memperlihatkan tingkat deprivasi ekonomi yang paling rendah. Dengan kata lain, mahasiswa muslim cenderung tidak begitu tertekan secara ekonomi dalam kehidupan kesehariannya. Variasi ini mungkin terkait dengan keragaman latar belakang sosial ekonomi mahasiswa. Hampir seluruh responden muslim dan Hindu kuliah dengan biaya sendiri. Sebaliknya, kecuali mereka yang kuliah di PTA negeri, mahasiswa Katolik, Protestan dan Buddha kuliah dengan biaya lembaga agama di mana dia berada. Mereka umumnya, merupakan utusan, dan kader lembaga sosial-keagamaan. Banyak dari mahasiswa Katolik dan Protestan, terutama, yang kuliah atas rekomendasi dan/atau mewakili institusi keagamaan, denominasi atau sekte tertentu.

Berbeda dengan deprivasi sosial-ekonomi, tingkat deprivasi budaya responden cukup tinggi. Tingkat deprivasi budaya ini cukup bervariasi menurut variabel agama. Responden muslim mengalami deprivasi budaya yang paling tinggi, dan sebaliknya responden Katolik mengalami deprivasi budaya paling rendah. Data ini mengisyaratkan bahwa faktor globalisasi, penetrasi dan infiltrasi budaya asing, tepatnya *amerikanisasi* dan *westernisasi* gaya hidup (hedonis dan sekuler) telah membentuk tingkat deprivasi budaya di kalangan responden. Alhasil, secara tentatif dapat disimpulkan bahwa variabel penetrasi dan hegemoni budaya Barat via jendela globalisasi berdampak deprivatif pada penolakan, minimal resistensi psikologis responden terhadap kehadiran budaya asing dimaksud. Ini artinya bahwa faktor sosial tidak menjadi unsur utama yang membentuk kadar beragam deprivasi turunan lainnya. Sikap konservatif terhadap tradisi dan kearifan lokal meretas di kalangan responden. Tingkat deprivasi pada ranah ini sangat homogen di kalangan responden. Hal ini

mengisyaratkan bahwa faktor penetrasi dan hegemoni budaya asing menjadi faktor deprivatif penting pada kejiwaan responden. Dinamika dan carut-marut politik menjadi faktor penting kedua yang membentuk deprivasi di kalangan responden. Tingkat deprivasi politik secara umum dalam konteks sistem dan kinerja politik berbasis representasi sangat tinggi, dan deprivasi ini tidak berbeda secara signifikan menurut basis agama. Kekecewaan terhadap raport buruk politik yang korup dan lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan telah mengendap kuat dalam benak dan batin responden. Data ini mengisyaratkan bahwa tingkat kepercayaan responden terhadap sistem dan kinerja politik tanah air sangat rendah. Bahkan pada titik yang mengkhawatirkan, kekecewaan ini telah berubah menjadi wujud deprivasi. Apakah deprivasi politik berpengaruh terhadap tingkat radikalisme agama mahasiswa PTA? Kekecewaan responden terhadap politik tanah air memuncak pada kekecewaan terhadap politik penegakan hukum. Data penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat deprivasi politik penegakan hukum sangat tinggi. Responden umumnya kecewa terhadap politik penegakan hukum di tanah air. Bahkan kekecewaan ini merata lintas agama. Apakah tingkat deprivasi di ranah budaya dan politik ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa PTA? Dimensi deprivasi budaya dan politik menjadi faktor kunci dibandingkan deprivasi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, analisis akhir untuk melihat efek individual setiap unsur deprivasi ini lebih menekankan pada peran spesifik, terutama unsur deprivasi politik penegakan hukum dan deprivasi pengikisan nilai-nilai budaya tradisional. Karena kedua sub dimensi berkorelasi sangat kuat dan positif dengan sub dimensi deprivasi lainnya.

Tabel 1

Korelasi antar Dimensi Deprivasi

		Deprivasi ekonomi	Deprivasi politik (sistem politik)	Deprivasi politik penegakan hukum	Deprivasi dampak budaya modern	Deprivasi pengikisan budaya tradisional
Deprivasi Sosial (n = 750)	R	.202**	.177**	.270**	.286**	.478**
	Sig.	.000	.000	.000	.000	.000
Deprivasi Ekonomi (n = 750)	R		.176**	.229**	.090*	.171**
	Sig.		.000	.000	.015	.000
Deprivasi (Sistem) Politik (n = 750)	R			.558**	.373**	.433**
	Sig.			.000	.000	.000
Deprivasi Politik Penegakan Hukum (n = 750)	R				.567**	.521**
	Sig.				.000	.000
Deprivasi Dampak Budaya Modern (n = 750)	R					.565**
	Sig.					.000

Tingkat Radikalisme

Fenomena radikalisme agama terlihat nyata di Indonesia. Teror bom bunuh diri dan penyerangan terhadap fasilitas dan organisasi paham keagamaan minoritas seringkali terjadi. Para pelaku utamanya adalah anak-anak muda, seusia dengan kebanyakan mahasiswa pada umumnya. Walaupun teror bom dan penyerangan terhadap kelompok paham keagamaan minoritas hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari umat beragama di tanah air, namun dampaknya cukup meresahkan.

Model konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah konstruksi radikalisme yang terukur berdasarkan sejumlah indikator. Karena anasir radikalisme beragam, mulai dari radikal dalam hal-hal yang berbasis pada pendirian teologis, sampai pada model dan strategi politik radikalisme. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis faktor (*factorial analysis*) terhadap sejumlah indikator yang digunakan,

radikalisme dipilah menjadi tiga dimensi, yaitu sikap teologi radikal keagamaan, politik radikal keagamaan, dan sikap terhadap instrumentasi (penggunaan) media dan strategi berbasis kekerasan untuk penegakan ajaran agama. Dimensi pertama untuk memotret tingkat (basis) teologi radikalisme. Dimensi *kedua* untuk memotret pendirian politik (gerakan) radikalisme. Dimensi *terakhir* untuk memperlihatkan strategi dan metodologi politik gerakan radikal di kalangan mahasiswa PTA. Dengan pemilahan dimaksud, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan spesifik tentang fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa PTA menurut ranahnya masing-masing.

Jika rentang kontinum radikalisme dipilah menjadi empat kategori, maka deskripsi pemaknaannya sebagai berikut. Level *pertama* mengisyaratkan bahwa radikalismemasihmengendaplatendalam kesadaran teologis umat beragama yang masih laten-emanen dalam kehidupan keagamaan seseorang. Ranah pertama

menjadi basis sikap kecenderungan untuk perilaku radikal yang lebih aktual dan vulgar. Level *kedua* telah memasuki ranah kesadaran strategis untuk aktualisasi pesan-pesan agama. Level ini ditandai dengan watak kecenderungan individu umat beragama untuk mengidealisasikan ajaran agamanya sebagai satu instrumen penyelesaian segala problem sosial, ekonomi dan politik. Level ini juga ditandai dengan dukungan terhadap pewacanaan positivisasi ajaran agama. Level *ketiga* adalah ranah kecenderungan bertindak yang lebih bersifat kondisional, rasional dan sedikit pragmatis. Level *keempat* adalah radikalisme yang mengarah pada perilaku keagamaan dengan segala manifestasi kekerasan, yang puncaknya adalah teror bom bunuh diri dan penyerangan terhadap kelompok yang dinilai berseberangan dengan paham keagamaannya.

Kecenderungan *Teologi Radikal Keagamaan*, pada tingkat radikalisme yang masih tergolong rendah, di level pertama (25 poin). Namun, angka-angka statistik ini mengingatkan bahwa pendirian keagamaan radikal dapat menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat, ketika ia menemukan momentum pemicu yang kondusif untuk aktualisasinya. Walaupun rendah, namun secara teoritis, basis teologi radikal ini akan mengalami eskalasi jika ia didorong oleh sejumlah faktor, hal ini terutama krusial untuk mahasiswa muslim. Berdasarkan data dari satuan indikator bahwa faktor dukungan dan apresiasi kepada kelompok gerakan Islam garis keras cukup tinggi. Tingkat kebanggaan terhadap pelaku bom diri, karena mereka dinilai berani dan sungguh-sungguh berjuang untuk agama, mencapai 21 poin, dan dukungan terhadap gerakan Islam radikal ala sejumlah pelaku mencapai 31 poin. Dengan kata lain, figur-figur gerakan Islam yang diidentikkan 'garis keras' masih mendapat dukungan.

Terdapat hal menarik untuk dicermati lebih kritis yaitu angka *standar deviasi* kecenderungan teologi radikal keagamaan sangat tinggi, yaitu melebihi level 50 persen dari angka rata-rata (*mean* = 26). Statistik ini mengisyaratkan bahwa ada komunitas mahasiswa yang memiliki tingkat radikalisme yang ekstrim dan moderat. Artinya, ada variasi yang sangat menyolok dalam hal kecenderungan teologi radikal keagamaan di kalangan mahasiswa. Dalam konteks ini, responden muslim, konsisten dengan hasil studi yang lain, menunjukkan tingkat kecenderungan teologi radikal yang paling tinggi. Alhasil, mahasiswa muslim memiliki potensi bersikap dan bertindak radikal tertinggi, jika dibandingkan dengan kecenderungan radikalisme mahasiswa agama lainnya.

Secara keseluruhan, terlepas apapun agama responden, fenomena kesadaran teologis radikal tetap eksis, laten dan emanen, dan harus diperhatikan untuk suatu kepentingan peringatan diri (*early warning system*). Harus diakui bahwa pendirian radikal seperti ini pada jalur yang benar tidak selamanya berbuah negatif. Potensi ini dapat saja diarahkan ke ranah dan jalur yang konstruktif dalam beragama dan bermasyarakat dan bernegara.

Pada ranah *Politik Radikal Keagamaan* yang memasuki wilayah etos praksis. Jika ranah pertama di atas baru menyentuh level kesadaran teologis, ranah *kedua* ini sudah pada konteks kecenderungan untuk bertindak radikal *lebih aktual* pada level praksis dalam kehidupan umat agama. Satu hal yang penting untuk digaris-bawahi dari studi ini bahwa tingkat radikalisme di ranah gerakan politik praktis keagamaan relatif tinggi, yaitu telah menyentuh angka di atas 60 poin dari *score* maksimal 100. Secara konsisten, responden muslim tetap mencatat tingkat radikalisme gerakan politik keagamaan yang paling

tinggi. Namun satu hal yang masih perlu dicermati secara khusus adalah apakah variabel agama dengan model doktrin teologisnya menjadi faktor penting, signifikan dalam membentuk kecenderungan bertindak radikal. Hasil uji statistik varian yang dilakukan secara terpisah membuktikan bahwa variabel agama menjadi faktor determinan dan sangat signifikan ($p. 0.001$) dalam konstruksi kecenderungan bertindak radikal dimaksud.

Adapun kecenderungan afirmatif terhadap penggunaan media kekerasan untuk aktualisasi pesan agama. Secara keseluruhan, responden mahasiswa PTA masih cenderung bisa menerima penggunaan media kekerasan untuk usaha dan proses aktualisasi, pembelaan dan penegakan ajaran agama. Selain itu, tingkat kecenderungan dukungan terhadap penggunaan media kekerasan juga sungguh cukup tergolong tinggi. Data ini, secara total dan dukungan aspek lainnya, menyiratkan bahwa kesadaran teologis, terutama di ranah dogmatisme, sungguh erat kaitannya dengan kecenderungan instrumentasi media kekerasan untuk mencapai tujuan keagamaan. Ini artinya bahwa potensi bertindak radikal tersimpan laten, rapih dan emanen di benak dan hati-batin setiap umat beragama. Fenomena dukungan terhadap penggunaan media kekerasan untuk misi pembelaan kepentingan agama, atau bersikap dan bertindak radikal atas nama agama, semakin menguat untuk dua indikator utama yang lumrah dipakai dalam sejumlah penelitian

untuk mengukur tingkat radikalisme. Dukungan terhadap pembenaran penggunaan aksi teror saat jalan persuasif (damai) sudah tidak ada lagi untuk mencapai tujuan agama responden, dan kesiapan mati untuk membela kepentingan agama yang dianut sangat tinggi, di atas 50 poin dari score maksimal (100). Responden muslim secara konsisten menunjukkan tingkat dukungan yang paling tinggi terhadap kedua indikator utama dimaksud. Dengan kata lain, potensi kecenderungan bertindak radikal sangat kental dan kuat membatin di ranah kesadaran teologis yang sangat dogmatis, dan wacana strategi gerakan politik keagamaan.

Faktor-faktor yang terkait dengan Radikalisme

Data tentang hubungan variabel radikalisme (beserta sub dimensinya) dengan sejumlah variabel yang dimasukkan kedalam model analisis dapat disederhanakan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan isu kesadaran keagamaan (kedekatan dengan Tuhan, positivisasi norma agama dalam hidup keseharian, paham absolutisme kebenaran agama, sikap inklusivisme beragama, sikap eksklusivisme beragama, iman terhadap kuasa Tuhan, dan sikap terhadap keharusan aplikasi pesan agama). Sedang faktor eksternal mencakup unsur-unsur di luar diri individu yang berwujud dampak dari kekuatan dan keadaan sosial, politik dan budaya, dan terukur dengan deprivation sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Tabel 2

Hubungan Radikalisme dengan Beberapa Variabel untuk Semua Agama

Variabel Analisis	Ket	Sikap radikal keagamaan	Politik Radikal Keagamaan	Instrumentasi kekerasan untuk agama
Kedekatan dengan Tuhan (n = 750)	r	-.036	.047	-.007
	Sig.	.344	.194	.843
Positivisasi norma agama (n = 750)	r	.407**	.450**	.498**
	Sig.	.000	.000	.000
Paham absolutisme kebenaran agama (n = 750)	r	.323**	.569**	.677**
	Sig.	.000	.000	.000
Sikap inklusivisme keagamaan (n = 750)	r	.034	.226**	.264**
	Sig.	.374	.000	.000
Sikap eksklusivisme keagamaan (n = 750)	r	.565**	.539**	.584**
	Sig.	.000	.000	.000
Iman terhadap kuasa Tuhan (n = 750)	r	-.095*	.279**	.241**
	Sig.	.013	.000	.000
Sikap terhadap keharusan apli-kasi pesan agama (n = 750)	r	.165**	.477**	.542**
	Sig.	.000	.000	.000
Deprivasi sosial (n = 750)	r	.114**	.086*	.188**
	Sig.	.003	.018	.000
Deprivasi ekonomi (n = 750)	r	.124**	.125**	.125**
	Sig.	.001	.001	.001
Deprivasi dampak budaya modern (n = 750)	r	.069	.342**	.345**
	Sig.	.074	.000	.000
Deprivasi pengikisan budaya tradisional (n = 750)	r	-.052	.126**	.145**
	Sig.	.174	.001	.000
Deprivasi sistem politik (n = 750)	r	.004	.215**	.191**
	Sig.	.910	.000	.000
Deprivasi politik penegakan hukum (n = 750)	r	-.013	.214**	.188**
	Sig.	.731	.000	.000

Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan, variabel internal (kesadaran) *berkorelasi positif dan signifikan* dengan variabel radikalisme, kecuali untuk indikator perasaan kedekatan dengan Tuhan. Variabel eksternal berkorelasi secara signifikansi dengan politik radikal keagamaan dan kecenderungan dukungan pada instrumen media kekerasan untuk penegakan ajaran agama, tetapi tidak dengan sikap teologis radikalisme keagamaan. Dengan kata lain, orientasi keagamaan politis sangat berkaitan erat dengan tingkat radikalisme. Artinya, kelompok yang mendukung keras wacana agama politis adalah mereka

yang paling potensial untuk berperilaku secara radikal dalam konteks keagamaan. Dengan kata lain, kelompok pendukung gerakan positivisasi ajaran agama yang berhaluan “kanan”, fundamentalis, berpaham dogmatis dan absolutis terhadap kebenaran agama, serta cenderung bersikap eksklusif dalam menyikapi isu-isu aktual sosial keagamaan, secara statistik, teridentifikasi paling potensial untuk mendukung dan menggunakan media kekerasan berbasis agama untuk mendukung aktualisasi kepentingan kelompoknya, terutama untuk misi pencapaian target gerakan praksis.

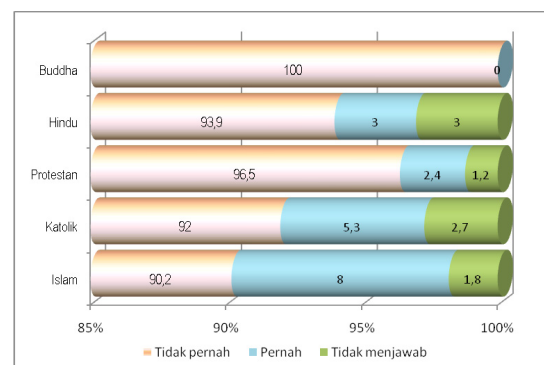
Jika dirinci lebih jauh, analisisnya adalah sebagai berikut. *Untuk variabel internal*, dimensi dukungan terhadap wacana dan proyek positivisasi norma agama di ranah sosial-politik, model paham keagamaan, dan orientasi eksklusif dalam beragama menjadi faktor terpenting untuk menjelaskan gejala radikalisme di kalangan mahasiswa PTA. Fenomena model ini jamak terlihat terlepas apapun afiliasi agama responden. *Untuk variabel eksternal* dan beragam variannya, hanya faktor deprivasi budaya dan (sistem) politik yang berkorelasi kuat, positif dan signifikan dengan tingkat radikalisme. Namun demikian, dalam konteks deprivasi budaya, hanya aspek deprivasi efek budaya modern yang berkorelasi paling kuat dan signifikan dengan potensi radikalisme terutama untuk dimensi praksisnya. Sementara itu, kontribusi sub variabel deprivasi sosial dan ekonomi tidak tergolong besar dalam membentuk kecenderungan radikal di kalangan mahasiswa PTA.

Temuan ini, *secara parsial*, tidak sejalan dengan keyakinan teoritis, tepatnya spekulasi banyak pakar dan pengamat politik radikalisme yang mengatakan bahwa akar radikalisme bersumber dari faktor di luar ranah non keagamaan, tetapi sebaliknya, lebih terbingkai apik sebatas dalam kerangka *sosial-ekonomi*, yang berwujud deprivasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, faktor kekecewaan terhadap politik praktis, dan sindrom, kegalauan dan keresahan terhadap dampak berantai dan global dari penetrasi budaya barat, dengan model *amerikanisasi* dan *westernisasi* gaya hidup bangsa Indonesia, telah menjadi akar masalah pemicu dan dasar pembenaran trend kecenderungan bersikap dan bertindak radikal di kalangan mahasiswa PTA.

Wujud Ekspresi Radikalisme Keagamaan

Ekspresi radikalisme di kalangan mahasiswa PTA dipilah menjadi ekspresi *behavioral* (tindakan) dan dalam wujud rencana. Informasi tentang pengalaman responden ikut merencanakan dan/atau melakukan aksi *sweeping* atau razia tempat-tempat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama (seperti tempat judi dan pelacuran) menurut basis agama. Secara umum, ekspresi radikalisme dalam wujud *sweeping* atau razia tempat-tempat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama tidak begitu akrab dalam tradisi mahasiswa PTA. Hanya sebagian kecil dari responden Muslim, Kristiani dan Hindu yang pernah terlibat dalam perencanaan dan/atau tindakan *sweeping* atau razia tempat-tempat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Responden muslim paling dominan di antara responden yang pernah melakukan aksi dan rencana *sweeping*. Aksi *sweeping* ini tidak dikenal dari praktek sosial-keagamaan responden Buddha.

Gambar 1
Pengalaman merencanakan atau melakukan *sweeping* tempat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama



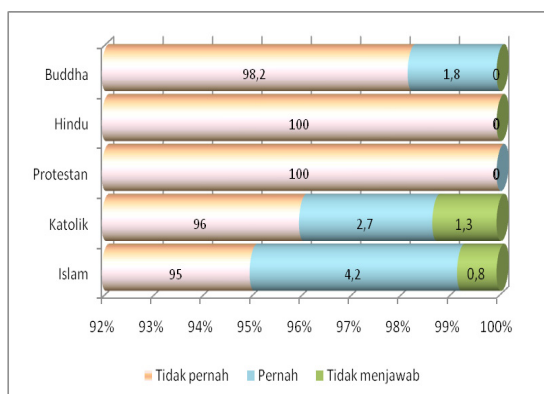
Satu catatan penting dari gambar di atas bahwa walaupun jumlah dan frekuensinya masih tergolong rendah,

namun gejala ekspresi radikalisme ini perlu dikritisi dan diantisipasi. Jika seorang alumni PTA yang terjun ke masyarakat akan membawa ideologi dan semangat keagamaan yang didapatkan saat kuliah, maka benih radikalisme ini suatu saat akan potensial menjelma menjadi satu ajakan gerakan massal yang radikal.

Aksi radikal dalam penelitian ini juga dipotret dalam wujud aksi demonstrasi terhadap kelompok yang dinilai menodai atau mengancam kesucian agama. Aksi demonstrasi memprotes kelompok yang dinilai menyimpang juga tidak begitu menggejala di kalangan mahasiswa PTA. Namun demikian, frekuensinya lebih besar dibandingkan dengan ekspresi radikal dalam bentuk *sweeping* atau razia di atas. Satu hal yang menarik di sini bahwa pengalaman terlibat dalam demonstrasi menentang kelompok yang dinilai menyimpang tersebut dilakoni oleh semua mahasiswa lintas PTA, lintas agama. Ini artinya bahwa semangat dan aktualisasi ekspresi radikal tersebut dapat berpotensi untuk menjelma suatu saat, ketika ada suatu momentum yang memfasilitasinya.

Gambar 2

Pengalaman melakukan penyerangan/
penolakan terhadap kehadiran rumah
ibadat umat agama lain



Berdasarkan data di atas, kecenderungan minat untuk ikut terlibat dalam aksi penyerangan terhadap tempat ibadah agama lain sangat rendah. Ringkasnya, wujud aksi radikal di kalangan mahasiswa PTA masih sangat rendah, dan fenomena ini hanya sebagai gejala sekelompok mahasiswa tertentu yang memiliki ideologi dan sindrom spesifik.

Terapi Anti Radikalisme: Membumikan *Peace Values Based Education*

Permasalahan kerukunan hidup antara umat beragama di Indonesia, seperti halnya pada umat-umat beragama di negeri lainnya, sering terganggu oleh riak-riak konflik sosial. Index toleransi di Indonesia pada medio 2011 misalnya. Data *OECD Social Indicators* menyajikan angka yang sangat rendah (30%) diantara negara-negara lain di dunia. Angka ini berada dibawah India (31%), dan merupakan negara terendah kedua (*bottom two*) setelah Estonia (26%). Canada dan Australia menjadi negara dengan tingkat toleransi tertinggi (84%). Meski demikian, perubahan toleransi terhadap kaum minoritas di Indonesia sejak 2007 hingga 2011 menunjukkan tren positif dibandingkan negara lain, yaitu sekitar 6%, jauh diatas India yang justru mengalami tren negatif -11% (*OECD Social Indicators, 2011: 99*).

Meski masih berada dalam kategori rendah, trend positif perkembangan toleransi di negeri ini haruslah tetap kita syukuri dan terus kita kembangkan dalam rangka menumbuhkan optimisme bersama bagi terciptanya budaya damai dan toleran, baik di internal agama maupun antar agama. Karena itu, secara kontekstual kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini akan kian *settled*, ketika doktrin dalam semua agama dipahami dalam konteks anjuran, seruan maupun perintah untuk melakukan hal-

hal positif guna mencapai kerukunan, persatuan dan kesatuan serta cinta dan kasih kepada sesama.

Penting untuk diungkapkan disini, bahwa syarat utama menciptakan perdamaian dan kerukunan beragama adalah kepercayaan yang didasari rasa saling mengerti satu sama lain. Tingginya kepercayaan antar umat beragama adalah syarat mutlak bagi harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia yang memungkinkan agama-agama itu hidup rukun dan damai. Penyelesaian konflik membutuhkan komunikasi, dan komunikasi dapat terjadi karena adanya rasa saling percaya. Konflik sesungguhnya sesuatu yang alami dan inheren di segala domain kehidupan, termasuk di domain agama. Konflik agama telah ada ketika agama-agama itu ada. Selama manusia tak mampu membebaskan diri dari *stereotype* negatif tentang agama lain, konflik agama akan terus ada. Dalam hal ini, pengelolaan konflik menjadi sesuatu yang niscaya untuk direalisasi, agar penyelesaian konflik membawa pada suatu kehidupan bersama yang lebih baik.

Pendidikan, selain terbukti menjadi 'ruang nyaman' tumbuhnya benih ideologi radikal --sebagaimana data yang telah dipaparkan sebelumnya--, ia juga mampu menjadi kawah candradimuka (ruang penempatan diri) yang sangat potensial bagi lahirnya pribadi-pribadi unggul yang bermoral, beradab, cinta damai dan religius berbasis nilai kemanusiaan yang holistik-komprehensif (dalam Islam disebut dengan istilah '*kaffah*'). Pada konteks ini, dalam rangka memosisikan pendidikan sebagai terapi anti radikalisme, formulasi penting yang dapat diupayakan adalah:

Pertama, pendalaman dan pemahaman aspek keagamaan tentang perdamaian, kerukunan dan kemanusiaan, yang tentu saja bukan sekedar berbasis intelektualitas-

kognitif, melainkan lebih menekankan aspek "penghayatan" (afektif) dan "pengamalan" (psikomototik). Hal ini diupayakan untuk mewujudkan pendidikan berbasis nilai kerukunan dan perdamaian (*peace values based education*) dalam rangka mendekatkan pemahaman tentang agama yang ramah terhadap realitas pluralisme. Pada saat yang sama, pendidikan berbasis nilai perdamaian diorientasikan untuk mengeliminasi keyakinan radikalistik tentang "kebenaran eksklusif" terhadap suatu agama. Karena salah satu pintu masuk radikalisme adalah dimensi pengetahuan yang kurang memadai atas nilai luhur yang terkandung dalam sebuah agama, maka memupuk karakter keagamaan sebaiknya juga dilandasi oleh basis nilai keberagamaan dalam wilayah yang moderat, seimbang (*balance*), toleran, dan adil; berkebalikan dengan kekerasan dan teror. Serangkaian pemahaman atas nilai keberagamaan tersebut pada gilirannya akan membuka itikad "dialogis" dalam mencari titik solusi ketimbang anarkhi.

Dalam rangka menghadapi paham radikalisme, tentu tidaklah cukup berbekal wacana, melainkan harus pula diimbangi oleh gerakan ideologisasi keagamaan perspektif humanitarian, yaitu dengan cara melakukan "*counter intellectual movement*" terhadap pemahaman keagamaan radikalistik tersebut. Selama ini, suburnya pemahaman radikalistik di domain pendidikan -sebagai pemicu potensi konflik sosial-keagamaan- lebih disebabkan oleh kelemahan 'gerakan intelektual' keagamaan moderat dalam mengimbangi 'gerakan ideologis' yang dilakukan oleh gerakan keagamaan kanan di berbagai satuan pendidikan, utamanya sekolah-sekolah, dan berbagai kampus negeri. Semestinya dilakukan gerakan intelektual sekaligus gerakan ideologis moderat dengan menggunakan berbagai piranti akademis, utamanya melalui materi ajar, guru, dan beragam kegiatan intra sekolah dan intra kampus.

Kedua, pengarus-utamaan moralitas (budi pekerti) sebagai praktik (amal), bukan sekedar intelektualitas, mengingat secara substansi, tidak satupun ajaran agama yang mengesahkan 'kekerasan' dalam menyelesaikan konflik. Dalam hal praktik inilah, pendidikan berbasis nilai perdamaian mendapati urgensinya. Ia memang diawali dari pengetahuan dan pemahaman (teori) yang dapat bersumber dari pengetahuan agama, sosial, dan budaya. Namun yang paling penting dari rangkaian panjang ini adalah 'mengamalkan' apa yang dipahami dalam kehidupan di lingkungan pendidikan (sekolah/kampus), di keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Hemat penulis, kerap terjadi kekeliruan dan ketidaktepatan dalam menentukan paradigma pembelajaran pendidikan di tanah air. Paradigma 'mengamalkan' berubah menjadi 'mengetahui' atau 'menghapal', tanpa kemampuan praktikum di lapangan. Ini yang membedakan antara paradigma pembelajaran sains dan matematika (*Natural sciences*) dengan paradigma pembelajaran nilai kemanusiaan (*humanities*). Dalam pembelajaran *humanities*, yang diperlukan adalah kemampuan guru, dosen, pendidik, pemimpin untuk 'menyentuh dan menyapa' keseluruhan dan keutuhan pribadi anak didik. Keutuhan pribadi anak didik secara manusiawi meliputi perasaan, rasio, imajinasi, kreativitas dan memori. Dengan begitu, paradigma pendidikan berbasis perdamaian seharusnya lebih tajam diarahkan pada 'kehendak' dan 'motivasi', dan bukannya intelektualitas. Oleh karena itu, yang perlu dikenal terlebih dahulu oleh para pendidik adalah struktur kepribadian manusia. Sedangkan motivasi atau kehendak sangat terkait dengan hatinurani. Maka pendidikan berbasis nilai perdamaian adalah pendidikan hatinurani.

Ketiga, indikator keberhasilan pendidikan berbasis nilai perdamaian dalam konteks ikhtiar mengeliminasi konflik sosial-keagamaan sesungguhnya bermula dari tumbuhnya kesediaan untuk 'menghargai nilai'. Menghargai nilai mengandung arti bahwa seseorang atau anak didik telah tersentuh hatinya dan dapat menyimpulkan bahwa nilai tersebut –semisal nilai kerukunan, nilai terhadap pentingnya perdamaian dan anti kekerasan, nilai saling menghargai perbedaan keyakinan-- sebagai sesuatu yang indah dan baik untuk diri pribadi dan masyarakatnya. Pribadi-pribadi tersebut menyatakan dalam hati masing-masing bahwa nilai-nilai baik itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dirinya.

Pada posisi demikian, terjadi tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam pendidikan berbasis perdamaian dalam konteks mengeliminasi konflik sosial-keagamaan, yaitu dari tindakan menghargai nilai, meningkat kepada penerimaan nilai dengan penuh kesadaran dan ketulusan, dan akhirnya berujung pada pengamalan dan penerapan nilai dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, negara bahkan sebagai warga dunia. Sampai disini, maka nilai-nilai kebaikan tadi telah melekat, tertanam kokoh dan terbiasa dalam sepak terjang kehidupan peserta didik (siswa), mahasiswa dan anggota masyarakat dimanapun dan kapanpun dan dalam cuaca sosial, agama, politik, dan ekonomi.

Penutup

Berbagai aspek penting dalam pendidikan berbasis nilai perdamaian (*peace values based education*) diatas, dapat menjadi upaya apresiatif dalam rangka ikut menyelesaikan konflik sosial-keagamaan yang masih rentan terjadi di negeri Indonesia tercinta ini. Beberapa

rekomendasi yang perlu digarisbawahi adalah: diperlukan penyegaran sikap, komitmen seluruh warga masyarakat dan pembaharuan metode dan pendekatan pendidikan yang lebih integratif-interkoneksi-koordinatif. Keluasan teori dan praktik pendidikan perlu dijadikan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilakukan selama ini.

Lebih lanjut, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila perlu dikaitkan dengan isu-isu baru yang lebih menyentuh kebutuhan dasar manusia (*Human Development Index*) seperti kesehatan (*reproductive health*), kesetaraan gender (*gender equity*), pemerintahan yang baik (*good governance*), kesejahteraan ekonomi (*enterpreneurship*) dan rembug bersama para pemimpin agama (*faith-based*

organization) tentang permasalahan sosial kebangsaan, dan terlebih tentang toleransi dan penghargaan atas perbedaan.

Basis nilai-nilai perdamaian, tidak semata-mata bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial struktural. Meskipun pada gilirannya kriteria penentunya adalah nilai-nilai individual yang bersifat personal. Pendidikan yang berkaitan dengan dimensi sosial struktural, lebih melihat bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif ditengah pertumbuhan individu. Dalam konteks inilah, kita bisa meletakkan radikalisme agama dan bermacam bentuk konflik sosial keagamaan sebagai 'musuh bersama' (*common enemy*) yang senantiasa mengancam keutuhan sosial dan struktural pondasi berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Azyumardi Azra, *Kompas*, 27 April 2011; Azyumardi Azra, 1996. *Pergolakan politik Islam, Dari Funda-mentalis, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Ismail Hasani, et.al, 2011. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Keragaman/Berkeyakinan*. Jakarta: Setara Institute.
- OECD Social Indicators, *Society At Glance* 2011.
- Martin E. Marty, 1995. *Fundamentalisms Comprehended: The Fundamentalism Project*. USA: University of Chicago Press.
- Syamsul Bakri, 2004. *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*, Dinika, Vol. 3, No. 1.
- The New Central Asia, the Creation of Nations* (Londres: Tauris, 2000). Sumber diakses dari <http://www.ssrc.org/sept11/essays/metcalfe.htm> Social Science Research Council (New York: Seventh Avenue), 810 NY 10019 USA | 212-377-2700/2727. Pada tanggal 3 Mei 2012.
- Tim Survei, 2011. Laporan Penelitian, *Ancaman bagi Ideologi Negara melalui Radikalisme Agama*. Jakarta: Lembaga Penelitian Uhamka.